

SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: BPPD Genjot Raihan Pajak
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Galamedia / Hal.2
Edisi	: Rabu, 11 Juli 2018

BPPD

Genjot Raihan Pajak

BALAI KOTA, (GM).-

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung akan menggenjot perolehan pajak tahun 2018 pada semester dua. Tahun ini, target perolehan pajak Kota Bandung sebesar Rp 2,6 triliun dan hingga semester satu baru tercapai Rp 900 miliar.

"Sekarang kita berbicara semester dua yang harus kita kejar Rp 1,7 triliun. Kita akan ditopang oleh siklus kebiasaan warga pembayar PBB (pajak bumi dan bangunan)," ungkap Kepala BPPD Kota Bandung, Ema Sumarna pada program Bandung Menjawab di Taman Sejarah, Jalan Aceh, Selasa (10/7).

Saat ini, kata Ema, perolehan pajak PBB baru Rp 96 miliar, sedangkan target Rp 700,5 miliar. Masih ada peluang Rp

600 miliar dari PBB.

"Mudah-mudahan Rp 600 miliar ini terkejar sampai Agustus dengan dasar warga masyarakat kesadarannya semuanya maksimal, artinya tidak ada lagi WP (wajib pajak) menunggak pajak nah," tandasnya.

Tak hanya itu, BPPD Kota Bandung juga telah menyensus PBB untuk memastikan data wajib pajak di Kota Bandung. Dengan begitu, tak ada lagi kekeliruan data PBB dengan fakta di lapangan.

"Kadang-kadang ada data yang belum diperbaharui oleh wajib pajak. Di data masih bangunan 1 lantai, ketika disensus bangunan sudah dua lantai. Data itu lalu kita perbarui," kata Ema.

Pihaknya, ungkap Ema, gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. "Mudah-mudahan dengan seiring kita ingatkan mereka pada waktunya tidak melebihi tanggal 30 agustus, semua WP PBB melakukan pembayaran," ungkapnya.

Optimistis

Ema optimistis target tahun ini bisa tercapai karena bila dilihat dari kinerja per bulan cukup bagus. "Pada bulan Januari 2018, perolehan pajak Kota Bandung mencapai 119%, bulan Februari dan Maret 107%, April 112%, Mei 116%, dan Juni pas-pasan," ungkapnya.

Menurut Ema, tidak maksimalnya perolehan pendapatan pada Juni karena adanya libur Lebaran selama delapan hari sehingga tidak ada kegiatan transaksi.

"Mudah-mudahan tidak multiinterpretasi libur panjangnya kita senang, tapi dari sisi pendapatan ternyata ada durasi waktu efektif delapan hari itu orang tidak bisa bertransaksi melakukan aktivitas pembayaran pajak. Sehingga kami kehilangan Rp 30 miliar-Rp 40 miliar itu yang faktual. Kami berharap bisa tertutupi di bulan Juli," katanya. (B.95)**